



## JURNAL ILMIAH Ekonomi Modern dan Tradisional

Journal website: <https://jiemt.hellowpustaka.id/index.php>

ISSN: 3063-9344 (Online)  
<https://doi.org/10.61166/jiemt.v2i1g>

Vol. 2 No. 1 (2025)  
pp. 59-67

### Research Article

# Implementasi Sistem Anggaran Berbasis Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

Riris Firnanda<sup>1</sup>, Dina Aprilia P<sup>2</sup>, Tesya Permatasari<sup>3</sup>, Ahmad Luthfi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi S1 Manajemen, STIE Al-Anwar Mojokerto, Indonesia

<sup>4</sup> STIE Al-Anwar Mojokerto, Indonesia

Correspondent: [ririsfirnandao@gmail.com](mailto:ririsfirnandao@gmail.com) 



Copyright © 2024 by Authors, Published by Jurnal Ilmiah Ekonomi Modern dan Tradisional. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : Okct 10, 2024  
Accepted : Feb 15, 2025

Revised : Nove 18, 2024  
Available online : Apr 01, 2025

**How to Cite:** Firnanda, R., Aprilia, D., Permatasari, T., & Luthfi, A. Implementasi Sistem Anggaran Berbasis Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Modern Dan Tradisional*. Retrieved from <https://jiemt.hellowpustaka.id/index.php/i/article/view/9>

### Abstrak.

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi sistem anggaran berbasis teknologi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, terutama dalam sektor publik. Dengan semakin berkembangnya teknologi, sistem anggaran elektronik (e-budgeting) menjadi alat penting untuk mengelola keuangan secara lebih efisien dan akurat. Studi ini mengadopsi metode penelitian kualitatif melalui tinjauan literatur serta studi kasus implementasi e-budgeting di berbagai institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-budgeting memberikan dampak positif terhadap keterbukaan informasi keuangan dan meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan anggaran. Namun, masih terdapat tantangan seperti kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Oleh karena itu, strategi peningkatan kapasitas SDM serta investasi dalam teknologi informasi menjadi langkah penting dalam memastikan keberhasilan implementasi sistem ini.

**Kata Kunci:** E-Budgeting, Transparansi Keuangan, Akuntabilitas, Sistem Anggaran, Teknologi Keuangan

## PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Semakin banyak institusi yang beralih menggunakan sistem anggaran berbasis teknologi untuk mendorong efisiensi dan mencegah penyalahgunaan dana. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan dapat diakses secara terbuka oleh publik maupun pemangku kepentingan. Sistem anggaran berbasis teknologi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas proses perencanaan, pengalokasian, dan pemantauan anggaran. Dengan dukungan sistem digital, proses yang sebelumnya manual dan rawan kesalahan dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien. Implementasi ini juga memungkinkan data keuangan dikelola secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik (Amborowati et al., 2024).

Keuangan dalam sektor publik, teknologi informasi menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pengawasan dan transparansi anggaran. Salah satu solusi yang berkembang pesat adalah e-budgeting. Sistem ini memungkinkan pemerintah dan lembaga publik untuk memantau anggaran secara real-time, mengurangi potensi kebocoran, serta meningkatkan efisiensi administratif. Melalui e-budgeting, setiap transaksi yang dilakukan akan tercatat secara otomatis dalam sistem. Hal ini sangat membantu dalam pengawasan anggaran serta mempermudah proses audit. Informasi yang dihasilkan dari sistem ini pun lebih akurat, sehingga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan cepat (Baihaqi, 2023).

Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi e-budgeting tidak lepas dari tantangan. Salah satu hambatan utama adalah resistensi dari individu atau kelompok yang terbiasa menggunakan sistem manual. Mereka mungkin merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, terutama jika tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem digital (Bani et al., 2024). Selain resistensi terhadap perubahan, kendala lain datang dari kurangnya infrastruktur teknologi di beberapa institusi. Keterbatasan perangkat keras, jaringan internet, serta sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi informasi menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi menyeluruh yang mencakup pelatihan SDM, peningkatan infrastruktur, serta dukungan kebijakan yang mendorong transformasi digital dalam pengelolaan anggaran (Isnaini, 2024).

Faktanya dalam era digital, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi faktor kunci dalam mencapai tata kelola yang baik. Pemerintah dan organisasi swasta semakin beralih ke sistem anggaran berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi penyalahgunaan dana, serta memastikan keterbukaan informasi keuangan. Implementasi sistem ini bertujuan untuk memperbaiki proses perencanaan, pengalokasian, dan pemantauan anggaran secara

lebih akurat dan efisien (Syaipudin & Amalia, 2023). Teknologi informasi telah memainkan peran penting dalam transformasi sistem pengelolaan keuangan, terutama dalam sektor publik yang sering menghadapi tantangan dalam pengawasan dan transparansi anggaran. E-budgeting menjadi solusi yang dapat mengurangi potensi kebocoran anggaran, meningkatkan efisiensi proses administrasi, serta mempermudah akses terhadap informasi keuangan yang lebih akurat dan real-time. Dengan sistem ini, setiap transaksi dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga meningkatkan pengawasan dan mempermudah audit keuangan (Syaipudin, 2023).

Meskipun manfaatnya cukup besar, penerapan e-budgeting masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak yang terbiasa dengan sistem manual. Selain itu, tidak semua institusi memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung implementasi sistem ini. Faktor lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, termasuk pelatihan intensif bagi pegawai, investasi dalam infrastruktur teknologi, serta kebijakan yang mendukung transformasi digital dalam sistem anggaran (Syaipudin & Awwalin, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dan tantangan penerapan sistem anggaran berbasis teknologi, khususnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dengan memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi e-budgeting, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan serta institusi yang ingin mengadopsi sistem ini di masa depan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penerapan e-budgeting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan studi kasus. Studi literatur difokuskan pada analisis berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan yang relevan dengan topik e-budgeting. Melalui kajian pustaka ini, peneliti memperoleh gambaran teoretis dan empiris mengenai peran teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam konteks sektor publik (Sugiyono, 2018).

Selain studi literatur, pendekatan studi kasus juga digunakan untuk mendapatkan data kontekstual dari institusi-institusi yang telah menerapkan e-budgeting. Studi kasus ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi dampak langsung dari penerapan sistem terhadap proses pengelolaan keuangan, termasuk bagaimana sistem tersebut mempengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi

anggaran. Dengan menggali pengalaman nyata dari institusi yang menjadi objek penelitian, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih konkret mengenai keberhasilan dan hambatan yang muncul selama proses implementasi (Purnama, 2013).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara utama, yaitu wawancara dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan terhadap para stakeholder yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan anggaran, seperti pegawai keuangan, pengambil kebijakan, dan teknisi sistem. Selain itu, dokumen keuangan yang relevan seperti laporan realisasi anggaran dan dokumentasi sistem juga dianalisis untuk mendapatkan informasi yang objektif dan mendalam (Sugiyono, 2018). Gabungan metode ini memungkinkan peneliti untuk menyusun analisis yang komprehensif mengenai efektivitas e-budgeting dalam konteks riil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem anggaran berbasis teknologi atau e-budgeting membawa sejumlah manfaat signifikan bagi pengelolaan keuangan, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Sistem ini terbukti mampu mendorong praktik tata kelola keuangan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Salah satu manfaat utama dari e-budgeting adalah peningkatan transparansi. Melalui sistem ini, informasi mengenai perencanaan dan penggunaan anggaran dapat diakses secara terbuka oleh publik maupun stakeholder terkait. Aksesibilitas ini membantu mencegah praktik manipulasi data dan memperkuat partisipasi publik dalam proses pengawasan anggaran (Purnama & Wibisono, 2025).

Dengan transparansi yang lebih tinggi, potensi penyalahgunaan dana publik dapat ditekan. Kejelasan data dan keterbukaan dalam setiap tahap proses anggaran memungkinkan pengawasan yang lebih efektif, baik dari internal lembaga maupun dari pihak eksternal seperti lembaga pengawas dan masyarakat (Syaipudin, 2020). Selain transparansi, e-budgeting juga memperkuat akuntabilitas institusi. Sistem digital menyimpan jejak setiap transaksi secara otomatis dan sistematis. Hal ini sangat memudahkan proses audit, karena semua informasi terdokumentasi dan dapat ditelusuri dengan mudah (Woli, 2018).

Dokumentasi digital tersebut meningkatkan kemampuan lembaga untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Pejabat yang bertugas dalam pengelolaan keuangan tidak dapat dengan mudah mengubah data tanpa meninggalkan jejak, sehingga mendorong perilaku yang lebih akuntabel (Bastian, 2016). Efisiensi juga menjadi keuntungan besar dari implementasi sistem ini. Proses perencanaan, pengalokasian, dan pelaporan anggaran yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat melalui sistem digital.

Waktu dan sumber daya yang sebelumnya habis untuk pekerjaan administratif bisa dialihkan untuk tugas strategis.

Kecepatan proses ini juga berarti pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih tepat karena informasi tersedia secara real-time. Selain itu, pengurangan kesalahan manual dalam input data turut menyumbang pada peningkatan kualitas pengelolaan anggaran (Glinkowska, 2016). Manfaat lain dari e-budgeting adalah integrasi data keuangan yang lebih baik. Sistem ini menggabungkan berbagai informasi anggaran dalam satu platform, sehingga memudahkan analisis keuangan dan perencanaan anggaran jangka panjang. Data yang terintegrasi juga membantu meminimalkan duplikasi dan inkonsistensi dalam laporan keuangan (Syaipudin & Luthfi, 2024).

Kemudahan dalam melakukan analisis memungkinkan para pengambil kebijakan untuk merancang strategi anggaran yang lebih efektif. Selain itu, sistem ini mendukung perencanaan berdasarkan data historis dan proyeksi yang akurat, memperkuat proses pengambilan keputusan berbasis bukti (Gunawan, 2016). Penggunaan sistem digital juga membantu mengurangi potensi praktik korupsi. Dengan adanya jejak digital atas setiap aktivitas anggaran, tindakan manipulatif menjadi lebih sulit dilakukan. Setiap perubahan dalam sistem dapat dilacak, sehingga mendorong perilaku yang lebih transparan dan bertanggung jawab (Karunasena & Singh, 2018).

Namun demikian, penelitian ini juga mencatat adanya tantangan signifikan dalam penerapan e-budgeting. Salah satu hambatan yang paling umum adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak pegawai yang sudah terbiasa bekerja dengan sistem manual mengalami kesulitan saat harus beradaptasi dengan sistem baru berbasis teknologi (Rahman & Rosidi, 2018). Resistensi ini sering kali bersumber dari kurangnya pemahaman terhadap manfaat sistem atau ketakutan akan perubahan peran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, proses sosialisasi dan pendampingan menjadi langkah penting dalam proses implementasi (Schillemans, 2012).

Selain resistensi, tantangan lain adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Tidak semua institusi, terutama di daerah, memiliki perangkat keras dan konektivitas internet yang memadai untuk menjalankan sistem e-budgeting secara optimal. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam penerapan antar wilayah atau antar lembaga (Slyke, 2016).

Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi juga menjadi kendala. Dibutuhkan pelatihan intensif agar pegawai dapat memahami dan mengoperasikan sistem e-budgeting dengan baik. Tanpa dukungan SDM yang kompeten, implementasi sistem ini bisa berjalan tidak efektif (Udeh et al., 2024). Selain itu, kendala finansial juga menjadi masalah. Beberapa organisasi menghadapi keterbatasan anggaran untuk membiayai pengadaan, pengembangan,

serta pemeliharaan sistem e-budgeting. Hal ini menyulitkan upaya transformasi digital secara menyeluruh dan berkelanjutan. Terakhir, aspek keamanan data juga menjadi perhatian penting. Karena seluruh informasi keuangan disimpan secara digital, ancaman seperti kebocoran data, peretasan, dan serangan siber menjadi risiko yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, sistem harus dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang memadai (Yasmin, 2018).

Dengan mempertimbangkan manfaat dan tantangan yang ada, implementasi e-budgeting memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan strategis. Investasi pada infrastruktur, penguatan kapasitas SDM, serta kebijakan yang mendukung transformasi digital harus menjadi prioritas agar sistem ini dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penerapan sistem anggaran berbasis teknologi terbukti mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan sistem ini, informasi keuangan dapat diakses dengan lebih terbuka, risiko penyalahgunaan dana berkurang, serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran meningkat. Namun, keberhasilan implementasi sistem ini bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, keterampilan sumber daya manusia, serta kebijakan yang mendukung adopsi teknologi dalam pengelolaan anggaran.

Untuk memastikan efektivitas implementasi e-budgeting, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan pelatihan bagi pegawai, investasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai, serta penerapan kebijakan yang mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dengan upaya yang berkelanjutan, e-budgeting dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik di masa depan.

## REFERENSI

- Amborowati, A., Ningsih, H., Pusparisti, M., & Paradhita, A. N. (2024). OPTIMALISASI PRODUKSI PETERNAKAN AYAM BROILER MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN OPERASIONAL DI SIMO BOYOLALI. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 773-782.
- Baihaqi, M. R. (2023). Dampak Usaha Peternakan Ayam Petelur terhadap Perekonomian di Desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
- Bani, H. H. A., Darmawan, H., & Rinanti, R. F. (2024). Aplikasi Good Farming Practices Pada Ayam Petelur Milik Bapak Jumain di Desa Sekar Putih Kecamatan Junrejo, Kabupaten Malang (Doctoral dissertation, Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tungadewi).
- Bastian, I. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE. Open Journal Systems

- Das Prenaa, G., & Deviyanti Putri, P. (2020). Implementation of E-Budgeting to Government Performance with Internal Control as a Moderation Variable. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1318–1328. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i05.p19>
- Dianawati, R. (2018). Dampak Sosial Dan Ekonomi Terhadap Usaha Peternakan Ayam Petelur Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Faharuddin, Ansarullah, Sriwijanaka Hartono, and Mukhtar Thahir Sarkawi. "Pemanfaatan Limbah Bulu Ayam Sebagai Material Panel Dinding Ramah Lingkungan Sebagai Bentuk Penerapan MBKM." *Window of Community Dedication Journal* (2021): 86-94.
- Fajri, N., Lestari, R. I., Rezki, A. D. S., & Achmad, A. M. F. (2023). Peningkatan Keterampilan Manajemen Perencanaan Skala Industri Kecil yang Efisien pada Rahmat Farm di Desa Kanaungan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. *IbMAS ATIM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 18-22.
- Glinkowska, B. (2015). Classical and Modern Concepts of Corporate Governance (Stewardship Theory and Agency Theory). *Management*, 19(2), 84–92. <https://doi.org/10.1515/manment-2015-0015>.
- Goestjahjanti, F. S., Srinita, S., Wihardjo, M. T., Novitasari, D., Basuki, S., Kumoro, D. F. C., & Himmy'azz, I. K. (2024). Program Teluria Seribu Telur Satu RW sebagai Program Unggulan Untuk Menopang Ekonomi dan Taraf Hidup Masyarakat Jatiwarna Kota Bekasi. *Proletarian: Community Service Development Journal*, 2(1), 39-46.
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72–102.
- Hawa, S. D., Rahayu, S. N., & Saputri, F. A. (2023). Program Pelatihan Akuntansi bagi UMKM Peternakan Ayam Petelur Kecamatan Paguyangan Brebes. *JAMU: Jurnal Abdi Masyarakat UMUS*, 4(01), 67-73.
- Huda, K., Siswara, H. N., Zuhdi, A. M. H., Mubarok, A., & Dana, A. A. (2024). Inisiasi AMIS Integrated Farming Melalui Kelompok Peternak Ayam Petelur Menuju Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Charitas*, 4(02), 50-57.
- Iqbal, M., Varlitya, C. R., & Safwadi, I. (2021). Dampak Eksternalitas Balai Ternak Ayam Petelur di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 5(2), 119-127.
- Isnaini, Z. (2024). Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Lingkungan Sosial Di Sekitar Usaha Ternak Ayam Pedaging (Broiler): STUDI

- KASUS DI DESA DARMAJI, KEC. KOPANG KAB. LOMBOK TENGAH. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1), 1-12.
- Karunasena, K., & Singh, M. (2018). Measuring the Public Value of E-Government: A Case Study from Sri Lanka. *Journal of Transforming Government*, 5(1), 81-99.
- Kusmayadi, T., & Ibrahim, A. W. (2024). Analisis pandangan masyarakat terhadap peternakan ayam ras petelur (survei di wilayah desa cisurupan kecamatan cisurupan kabupaten garut). *JANHUS Jurnal Ilmu Peternakan Journal of Animal Husbandry Science*, 8(1), 37-52.
- Mahmudi, M., Farida, M., Azhari, S., & Kurniaty, R. (2023). Pembudidayaan Ayam Arab Petelur Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Gampong Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. *Jukeshum: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 321-327.
- Manese, M. A., Pandey, J., & Lenzun, D. G. (2018). Penerapan Teknologi Usaha Ternak Ayam Pekarangan Rumah yang Ramah Lingkungan Pada Kelompok Wanita Tani di Desa Sea I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.
- Mulyani, S. (2023). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terdampak Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku: Studi Kasus Pada Koperasi Setia Kawan Nongko Jajar Pasuruan. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 119-140.
- Rama Andika Thio Rahman, G. I., & Rosidi. (2018). Analisis Implementasi E-Budgeting dengan Menggunakan Model CIPP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Journal Sistem Informasi*, 14(2), 53-63.
- Riyanti, Rr, Khaira Nova, and Dian Septinova. "Penerapan Inovasi Ramah Lingkungan Moringa oleifera Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Peternakan Ayam Petelur CV. Marga Raya Farm." *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung* 3.2 (2024): 1-10.
- Schillemans, T. (2012). Moving Beyond the Clash of Interests: On Stewardship Theory and the Relationships between Central Government Departments and Public Agencies. *Public Management Review*, 15, 37-41.  
<https://doi.org/10.1080/14719037.2012.691008>
- Slyke, D. M. V. (2016). Agents or Stewards: Using Theory to Understand the Government- Nonprofit Social Service Contracting Relationship. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 17(2), 157-187.  
<https://doi.org/10.1093/jopart/mulo12>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syaipudin, L. (2020). Efektifitas Media Komunikasi di Tengah Pandemi: Respon Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung. *Kalijaga Journal of Communication*, 1(2), 165-178.

- Syaipudin, L. (2023). Contribution Of Young Entrepreneurs In Building The Creative Economy Of Village Communities. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(1), 80-98.
- Syaipudin, L., & Amalia, N. R. (2023). Analysis of Risk Management and Joint Office Based Business Development in the Real Estate Company Wework. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 2(4), 211-221.
- Syaipudin, L., & Awwalin, I. N. (2023). Analysis Traditional Market Revitalization For Economic Improvement of Kras Market Kediri. *MAR-Ekonomi: Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Rumpun Ilmu Ekonomi*, 1(02), 32-41.
- Syaipudin, L., & Luthfi, A. (2024). Pengaruh Financing to Debt Ratio dan Net Profit Margin terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2022. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Publik, Manajemen dan Perbankan*, 1(1), 10-21.
- Udeh, E. O., Amajuoyi, P., Adeusi, K. B., & Scott, A. O. (2024). The Role of Blockchain Technology in Enhancing Transparency and Trust in Green Finance Markets. *Finance & Accounting Research Journal*, 6(6), 825-850.  
<https://doi.org/10.51594/farj.v6i6.1181>
- Woli, I. (2018). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PETERNAKAN AYAM PETELUR DI TINJAU DARI MANFAAT DAN DAMPAK LINGKUNGAN DI DESA TOYADO DUSUN LEE KECAMATAN LAGE KABUPATEN POSO (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO).
- Yasmin. (2018). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengukuran Kinerja Pemerintahan di Kabupaten Bandung. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 101-116.